

KINERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENANGGULANGI DAN MENERTIBKAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SAMARINDA

Muhammad Alfian Noor. AR¹

ABSTRAK

Muhammad Alfian Noor. AR. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda, di bawah bimbingan Dr. Anthonius Margono, M.Si selaku pembimbing I dan Hj. Hariati, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja seks Komersial di Kota Samarinda serta faktor kendala atau penghambat. Fokus penelitian ini yaitu Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan pengambilan sumber data primer dengan teknik purposive sampling dan Accidental sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini diketahui bahwa Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda baik dalam kualitas kerja dan kemampuan berjalan dengan baik, hanya dalam hal inisiatif dan komunikasi belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari masih adanya perselisihan antara Satpol PP dengan para pekerja seks dan adanya oknum dari anggota Satpol PP yang justru bekerjasama dengan pihak Pekerja Seks Komersial, selain itu kendala yang dihadapi adalah kurangnya antusias masyarakat yang ingin membantu pihak satpol pp dalam melakukan penertibkan pekerja seks di Kota Samarinda sehingga masih banyak yang melakukan aktifitasnya pada malam hari dan juga para Pekerja Seks Komersial masih banyak yang tidak mendengarkan teguran ataupun penertiban yang dilakukan Satpol PP hingga terkendala pada saat melakukan penertiban.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email: malfian651@yahoo.com

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah sebagai pemegang peran penting dalam pembangunan nasional bertanggungjawab untuk berusaha mewujudkan pembangunan nasional agar terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Program-program pembangunan yang pemerintah rencanakan tentunya akan dilaksanakan atau dijabarkan oleh perangkatnya yang berwenang dari tingkat pusat hingga tingkat desa. Kegiatan operasional ini dilaksanakan secara bertahap dengan harapan dapat mewujudkan program-program tersebut sehingga tercipta suatu hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang bertugas untuk mengatur daerahnya masing-masing agar kesejahteraan rakyat tidak hanya dirasakan di pusat tetapi juga di daerah. Pada tingkatan daerah dikenal istilah SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas untuk mengatur roda pemerintahan agar sesuai dengan apa yang diinginkan kepala daerah dan sesuai dengan peraturan daerah yang ditetapkan demi terciptanya Pembangunan Nasional.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset pokok yang disebut Sumberdaya (*resources*), baik Sumberdaya Alam (*natural resources*), maupun Sumberdaya Manusia (*human resources*). Kedua sumber daya tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Menurut penulis, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam pembangunan karena dengan adanya sumber daya manusia maka kemudian dapat memanfaatkan sumber daya lainnya dengan baik.

Berbicara masalah Sumber daya Manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan nonfisik (kecerdasandan mental). Oleh sebab itu untuk kepentingan akselerasi suatu pembangunan di bidang apapun, maka peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia merupakan suatu prasyarat utama.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kinerja Pegawai Satpol PP Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota Samarinda ?
2. Faktor penghambat Kinerja Pegawai Satpol PP Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial (PSK) Kota Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Pegawai SATPOL PP dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial (PSK) di kota Samarinda .
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat Kinerja Satpol PP dalam Menanggulangi dan Menertibkan pekerja seks komersial dikota Samarinda.

Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus serta dapat menambah wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
- b. Secara praktis sebagai tolak ukur bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dalam menertibkan pekerja seks komersial dan sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori dan Konsep

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari ilmu manajemen, yang berarti merupakan suatu usaha untuk mengarahkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam suatu organisasi agar mampu berfikir dan bertindak sebagaimana yang diharapkan organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses yang menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan organisasi tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif pegawai ataupun karyawan. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu prosedur yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. (Sedarmayanti, 2001:46).

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Membahas tentang Manajemen Sumber Daya Manusia seperti yang disebutkan diatas maka untuk bisa mengetahui lebih jelas tentang Manajemen Sumber Daya Manusia, maka berikut adalah beberapa definisi yang di kemukakan oleh para ahli tentang Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah “suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu anggota organisasi atau perusahaan bisnis, Sadili (2005:22).

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Tujuan utama Manajemen Sumber Daya Manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi Sumber Daya Manusia terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung kepada manusia-manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam organisasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu mencapai tujuan organisasi.

Human Resource management (Manajemen Sumber Daya Manusia) adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, penempatan, pelatihan dan pengembangan organisasi (Stoner, 2003:68).

Pengertian Kinerja

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan organisasi, semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh para karyawan akan sangat membantu dalam perkembangan organisasi tersebut. Adapun beberapa pengertian kinerja menurut ahli. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dari definisi diatas kinerja lebih ditekankan pada tanggung jawab dengan hasil yang diharapkan (Widodo, 2006:78).

Kinerja Pegawai

Didalam pembahasan kinerja tentu ada beberapa bagian, dimana bagian itu dibagi menjadi 2, yaitu kinerja organisasi dan kinerja individu yang biasa disebutkan juga dengan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai kinerja pegawai, oleh karena itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang kinerja pegawai, berikut adalah beberapa definisi mengenai kinerja pegawai. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan/pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, (Mangkunegara, 2005:9).

Satuan Polisi Pamong Praja

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan motto Praja Wibawa untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dibentuklah Derasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai Surat

Perintah Jawatan Praja Di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura. Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950, dan inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Oleh karena itu, tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai hari jadi Satpol PP

Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) dan atau lebih dikenal dengan sebutan Tuna Susila adalah seorang wanita dan seorang pria (laki-laki) dan atau yang lebih melakukan hubungan intim dan atau hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapatkan imbalan jasa finansial maupun materil bagi dirinya sendiri maupun pihak lain dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan norma , sosial, agama, dan kekusilaan (termasuk didalamnya Wanita Tuna Susila, Mucikari, dan Waria Tuna Susila). Pekerja Seks Komersial juga adalah para pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau imbalan dari yang telah memakai jasa mereka tersebut (Koentjoro, 2004:26).

Definisi Konsepsional

Berdasarkan judul yang penulis angkat dalam penelitian skripsi ini maka penulis mencoba mendefinisikan konsepsional dari skripsi ini yaitu Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat kualitas kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi dan menertibkan para PSK, inisiatif para anggota satuan polisi pamong praja dalam membentuk tim penertiban, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, dan komunikasi antara anggota dalam satuan polisi pamong praja di dalam menangani aktifitas Pekerja Seks Komersial.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Kualitatif. Secara harfiah, Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Fokus Penelitian

Dari paparan di atas dan berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda meliputi :
 - a. Kualitas Kerja
 - b. Inisiatif
 - c. Kemampuan
 - d. Komunikasi
2. Faktor penghambat kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial Di Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti dapat menangkap dan memperoleh data yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *Accidental sampling*. Adapun yang menjadi informan inti (*key informan*) adalah 1) Kepala Bidang Operasional Satuan Polisi PAMong Praja, 2) Kepala Seksi Operasional Satuan Polisi Pamong Praja 3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, 4) Kepala Perundang undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan yang menjadi *informan* lain yaitu Masyarakat dan Pekerja Seks Komersial.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan beberapa metode yang sesuai dengan jenis penelitian yang penulis lakukan, teknik pengumpulan data tersebut antara lain :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu :
Memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi.
2. Penelitian Lapangan (Field Work Research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:
 - a. Observasi
Observasi yaitu sebagai teknik pengumpul data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari dan meneliti berbagai dokumen atau arsip yang menyangkut masalah pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif, yaitu menggambarkan tentang data dan fakta mengenai objek penelitian maka analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dan Saldana (2014:31-33) mengatakan bahwa di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: *Data Condensation*, *Data Display*, dan *Conclusion Drawing/Verifications*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota Samarinda dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960 berdasarkan UU darurat No. 3 tahun 1953. Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Kalimantan Timur. Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Seberang.

Hasil Penelitian

Kualitas Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi salah satu tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan penegakan Perda. Dalam rangka penegakan Perda, salah satu Perda yang harus di tegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perda Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda. Dalam pelaksanaan Perda tersebut tentunya Satuan Polisi Pamong Praja berharap hasil dari menertibkan pekerja seks komersial sesuai dengan apa yang diharapkan, hal tersebut dikatakan telah sesuai jika hasilnya sesuai dengan yang ada didalam Perda dimana pekerja seks komersial tidak boleh melakukan aktivitasnya

Inisiatif Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya dibutuhkan sebuah inisiatif yang baik, apabila inisiatif anggota berjalan maka membuat hasil pekerjaan menjadi lebih maksimal. Penertiban yang dilakukan oleh anggota Satpol PP secara rutin dilakukan 3 kali dalam sebulan, tetapi terkadang anggota Satuan polisi Pamong Praja juga menerima surat perintah untuk melakukan penertiban di daerah-daerah tertentu.

Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Komunikasi merupakan salah satu unsur penting didalam suatu kegiatan, apalagi penertiban ini bersangkutan dengan masyarakat yang mencari nafkah. Dengan adanya komunikasi akan membuat pekerjaan tersebut berjalan dengan baik, begitu juga dalam melakukan penertiban pekerja seks komersial, komunikasi yang baik antara anggota Satpol PP dengan para pekerja seks komersial sangat diperlukan sehingga tidak ada kesalahan dalam melaksanakan tugas karena saling mendukung, hal ini bertujuan agar hasil dari penertiban pekerja seks komersial menjadi lebih baik.

Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Kemampuan atau keahlian merupakan salah satu hal yang harus ada pada setiap anggota Satpol PP, ketika anggota Satpol PP Mempunyai keahlian yang mampu mengatasi permasalahan didalam penertibana maka kinerja dari Satpol PP dapat menjadi lebih baik. Kemampuan anggota Satpol PP dalam penertiban dapat dilihat pelatihan yang telah diberikan sebelum anggota diterima menjadi pegawai Satpol PP

Faktor Kendala atau Penghambat

Faktor penghambat dalam menertibkan dan meanggulangi Pekerja Seks Komersial tidak lepas dari kendala atau hambatan. Kendala atau hambatan merupakan sesuatu yang harus dihadapi dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Faktor kendala atau penghambat dalam melaksanakan penertiban dan menanggulangi Pekerja Seks Komersial yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda kurangnya inisiatif dan komunikasi.

Pembahasan

Kualitas Kerja Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda yang menjadi salah satu tugas dari Satpol PP adalah membantu Walikota dalam penegakan Perda, dimana salah satu Perda yang harus ditegakkan adalah Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial. Tentunya dalam penertiban pekerja seks komersial Satpol PP bekerja bedasarkan Perda yang ada, dimana dalam Perda ini dikatakan bahwa pekerja seks komersial dilarang melakukan aktifitasnya di tempat yang tidak memiliki izin. Hal inilah yang menjadi patokan bagi Satpol PP untuk melihat sejauh mana kualitas kerja mereka apakah sesuai atau tidak. Hal ini sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2011:51) Yaitu hasil kerja dari tiap-tiap individu atau pegawai yang diukur lewat kecermatan, ketelitian, dan ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Inisiatif Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Inisiatif anggota Satpol PP dalam menertiban dan menanggulangi pekerja seks komersial dapat dilihat dengan setiap anggota yang bekerja sesuai dengan tugas yang ada dan instruksi yang diberikan, tugas-tugas yang harus dilakukan

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Muhammad Alfian Noor.AR) oleh anggota Satpol PP telah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dimana dalam Perda dikatakan bahwa salah satu yang menjadi tugas Satpol PP adalah penegakan Perda. Selain berdasarkan tugas yang ada anggota Satpol PP juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya, dimana instruksi ini dijadikan dasar dalam melaksanakan tugas. Seperti yang dikatakan Sedarmayanti (2001:51) Yaitu merupakan sesuatu hal yang timbul dari dalam diri individu atau pegawai lewat setiap apa yang dikerjakan. Inisiatif merupakan upaya kreativitas dengan batas-batas tertentu yang dilakukan oleh individu atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya tanpa harus menunggu perintah atau instruksi dari atasan. Salah satu instruksi yang diterima berupa perintah untuk melakukan tugas didaerah atau tempat tertentu di Kota Samarinda

Komunikasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Komunikasi anggota Satpol PP dengan pekerja seks komersial sebelum melakukan penertiban pekerja seks komersial dapat dilihat dari setiap anggota saling respon yang ditunjukkan PSK saat dijalankannya penertiban dilapangan. Komunikasi antara anggota dan PSK ini menjadi faktor penting agar Satpol PP dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik. Akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP untuk mewujudkan komunikasi yang baik dengan pekerja seks komersial, hal ini seperti ketidakpahaman PSK tentang Perda yang melarang aktifitas PSK. Jika dilihat komunikasi antara anggota Satpol PP dengan pekerja seks komersial tidak berjalan begitu baik, tidak dapat dipungkiri bahwa komunikasi yang tidak baik antara anggota dan PSK dapat mempengaruhi kinerja dari Satpol PP dan hasil kerja mereka, karena untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik diperlukan komunikasi yang baik antara anggota Satpol PP dengan PSK. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2015-51) Yaitu komunikasi yang terjalin dengan baik antar *personal* atau individu pegawai dalam sebuah organisasi baik secara horizontal (antar sesama pegawai) maupun secara vertikal (antar pimpinan dan bawahan), guna memaksimal setiap penyelesaian tugas dan pekerjaan.

Kemampuan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda.

Kemampuan atau keahlian adalah hal yang harus dimiliki dari anggota Satpol PP karena dalam melakukan penertiban tentu akan ada insiden yang terkadang tidak diharapkan ataupun yang sesuai harapan. Karena saat ada insiden yang tidak diinginkan maka fungsi kemampuan ini adalah sebagai penengah agar tidak terjadi kesalahpahaman antara anggota dan PSK. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Sedarmayanti (2015-51) yaitu dimana setiap individu atau pegawai dituntut untuk memiliki kemampuan dalam setiap hal pekerjaan yang diperhadapkan kepadanya. Yang mana kemampuan individu ini dapat diperoleh berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu atau pegawai tersebut, dan juga dapat dibangun berdasarkan pengalaman dari tiap-tiap individu.

Faktor Kendala atau Penghambat

Faktor kendala atau penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban pekerja seks komersial adalah oknum Satpol PP. Hal ini tentunya menghambat rencana kegiatan yang telah dibuat. Tentunya hal ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Satpol PP untuk bekerja secara optimal dan sesuai dengan hasil yang sangat diharapkan. Selain itu permasalahan banyaknya pekerja seks komersial yang tidak mendengarkan arahan atau seruan dari Satpol PP agar tidak melakukan pekerjaannya di tempat yang tidak diperbolehkan bahkan pekerja seks komersial yang tidak terlalu peduli terhadap pelanggaran Perda yang terjadi dianggap menjadi kendala. Pekerja seks komersial hanya bisa menyalahkan Satpol PP akibat penertiban yang dilakukan. Padahal Satpol PP hanya mengerjakan tugasnya sebagai penegak Perda. Sementara para pekerja seks yang menganggap Satpol PP salah sebenarnya adalah pelanggar Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka,

1. Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi dan Menertibkan Pekerja Seks Komersial di Kota Samarinda yaitu :
 - a. Kualitas kerja dari penertiban pekerja seks komersial yang dilakukan oleh anggota Satpol PP cukup baik. Akan tetapi belum optimal dikarenakan masih banyak terdapat pekerja seks komersial yang beraktifitas di sekitaran vorvo dan citra niaga Kota Samarinda
 - b. Inisiatif anggota Satpol PP dalam penertiban Pekerja Seks Komersial sudah baik karena anggota Satpol PP bekerja berdasarkan tugas dan

instruksi yang diberikan oleh atasan, hampir seluruh anggota juga menaati peraturan yang ada seperti tidak bertindak kasar dan bekerjasama kepada Pekerja Seks Komersial. Walaupun ada beberapa oknum yang bekerjasama dengan Pekerja Seks Komersial. Satpol PP telah menetapkan sanksi bagi para anggotanya yang tidak menaati peraturan.

- c. Komunikasi antara anggota Satpol PP dan Pekerja Seks Komersial belum bisa dikatakan baik, karena masih sering terjadi insiden-insiden yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pelaksanaan penertiban. Sementara komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP dengan Polisi dan dinas sosial untuk menertibkan Pekerja Seks Komersial belum bisa dikatakan baik.
 - d. Kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh anggota Satpol PP sudah terbilang baik, karena saat penertiban anggota Satpol PP mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan apabila ada insiden yang terjadi dilapangan, anggota Satpol PP mampu untuk menghadapi para pekerja seks komersial agar mengerti mengenai pelanggaran yang telah dilanggar oleh para pekerja seks tersebut.
2. Adapun kendala/penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP adalah oknum dari internal Satpol PP dan juga oknum yang melindungi para pekerja seks komersial saat melakukan penertiban. Karena saat akan melakukan penertiban terkadang Pekerja Seks Komersial yang akan ditertibkan tidak beraktifitas karena adanya bocoran.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya sanksi tegas dari Satpol PP apabila terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Menjalankan komunikasi dengan baik kepada Pekerja Seks Komersial, seperti breafing mengenai peraturan tentang larang melakukan pekerjaan seks ditempat tersebut, agar pekerja seks lebih mengetahui kesalahan yang mereka lakukan. Dan agar tidak ada selisih paham antara Satpol PP dengan Pekerja Seks Komersial.
3. Penambahan jumlah anggota Satpol PP wanita yang siap untuk ditugaskan di lapangan, hal ini bertujuan agar pendekatan kepada Pekerja Seks Komersial dapat berjalan dengan baik dan tenang tanpa ada kekerasan. Karena mayoritas dari Pekerja Seks Komersial adalah wanita.
4. Melaksanakan sosialisasi mengenai peraturan daerah tentang larangan Pekerja Seks Komersial dengan cara mendatangi para PSK, agar PSK lebih mengetahui tentang peraturan daerah kota Samarinda tentang larangan melakukan aktifitasnya ditempat yang tidak diizinkan.

Daftar Pustaka

Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.

- Budiyanto, Eko. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Darmawan, Didit. 2013. *Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi*. Surabaya: Press Media.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Koentjoro, Ph.D. 2004. *On The Spot : Tutar Sang Pelacur*. Yogyakarta : tinta
- Keban, Yaremis T. 1995. *Indikator Kinerja Pemda: Pendekatan Manajemen Dan Kebijakan*. Yogyakarta: (makalah)
- Lamatenggo,Nina. 2012. *Teori Kinerja dan Pengukurannya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. *Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2003. *Perencanaan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Samsudin, Sadili. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sedarmayanti, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Simamora, Henry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung Alfabeta.
_____. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Kinerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (Muhammad Alfian Noor.AR)
Widodo, Joko. 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta:
Bayumedai Publishing.

Sembiring, Masana. 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi*. Bandung:
Fokusmedia

Nasucha, Chaizi 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta:
Grasindo.

Dokumen-dokumen

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Aparatur Sipil Negara No 05 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 05 Tahun 2012 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 19 Tahun 2001 tentang pengaturan dan
pembinaan pedagang kaki lima.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 1999. Keputusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara Nomor: 589/IX/6Y/99. *Tentang Pedoman
Penyesuaian Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2014.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Negara (Kepmenpan)
Nomor. 81 Tahun 1995.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sumber Internet:

Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. 2015. *Statistik Daerah Kota Samarinda*

2015, (Online), (<http://samarindakota.bps.go.id>, di akses 4 November
2015).